

Katalog BPS: 4102002.53

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2010



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2010



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2010

Nomor Publikasi : 53550.
Katalog BPS : 4102002.53

Ukuran Buku : 10,5 cm x 14,9 cm
Jumlah Halaman : vi + 41

Naskah:

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh:

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jl. R. Suprpto No. 5, Kupang 85111

Dicetak oleh:

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2010**

Anggota Tim Penyusun:

Pengarah : Ir. Poltak Sutrisno Siahaan

Penyunting : Sofan, S.Si, M.Si
Ir. Tutik Endari

Penulis : Indra A. S. Souri, M.Si
I Made Juli Ardana, SST
Dewi Kurnia Ayuningtyas, SST

Pengolah Data : Dewi Kurnia Ayuningtyas, SST
Sonia T. Amabi

<http://ml.bps.go.id>

**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2010**

Anggota Tim Penyusun:

Pengarah : Ir. Poltak Sutrisno Siahaan

Penyunting : Sofan, S.Si, M.Si
Ir. Tutik Endari

Penulis : Indra A. S. Souri, M.Si
I Made Juli Ardana, SST
Dewi Kurnia Ayuningtyas, SST

Pengolah Data : Dewi Kurnia Ayuningtyas, SST
Sonia T. Amabi

<http://nct.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Pembangunan manusia merupakan sebuah proses perubahan kualitas manusia menuju kehidupan yang lebih baik, khususnya dalam mengakses hasil pembangunan seperti memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Sebagai ukuran kinerja pembangunan, pembangunan manusia dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat direpresentasikan oleh indikator angka harapan hidup; dimensi pengetahuan direpresentasikan oleh indikator angka melek huruf dan rata-rata lamanya sekolah; sedangkan dimensi kehidupan yang layak direpresentasikan oleh indikator kemampuan daya beli. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi pembangunan manusia ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Angka IPM disajikan pada tingkat provinsi NTT dan kabupaten/kota. Penyajian angka IPM menurut kabupaten/kota memungkinkan setiap kabupaten/kota mengetahui peta pembangunan manusia baik pencapaian, posisi, maupun disparitas antar kabupaten/kota di NTT. Dengan mengetahui peta pembangunan manusia di semua daerah di NTT, maka diharapkan setiap daerah termotivasi untuk berupaya meningkatkan kinerja pembangunan melalui peningkatan kapasitas dasar penduduk.

Semoga publikasi berjudul "Indeks Pembangunan Manusia Nusa Tenggara Timur Tahun 2010" ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) termasuk masyarakat pengguna sebagai bahan rujukan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan publikasi ini.

Kupang, Oktober 2011

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NUSA TENGGARA TIMUR

Ir. Poltak Sutrisno Siahaan
NIP.19520806 197503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Tujuan Penulisan	3
1.3 Sistematika Penulisan	3
1.4 Sumber Data	4
BAB II. METODOLOGI PENGHITUNGAN	
2.1 Pengertian IPM	6
2.2 Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	6
2.2.1 Angka Harapan Hidup	6
2.2.2 Tingkat Pendidikan	7
2.2.3 Standar Hidup Layak	7
2.3 Penyusunan Indeks	9
BAB III. HASIL-HASIL IPM	
3.1 Perkembangan IPM Nusa Tenggara Timur	12
3.2 Perkembangan Komponen IPM	13
3.2.1 Angka Harapan Hidup	14
3.2.2 Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah	15
3.2.3 Daya Beli	17

BAB IV. DISPARITAS ANTAR WILAYAH KABUPATEN/KOTA

4.1	Capaian IPM Kabupaten/Kota	20
4.2	Status Pembangunan Kabupaten/Kota	24
4.3	Disparitas Pembangunan Manusia	24

BAB V. HUBUNGAN IPM DENGAN INDIKATOR EKONOMI

5.1	Hubungan Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita dengan Pembangunan Manusia	27
5.2	Hubungan PDRB per Kapita dengan Pembangunan Manusia	30

DAFTAR PUSTAKA	33
----------------------	----

LAMPIRAN TABEL	35
----------------------	----

<http://ntt.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli (PPP)	8
Tabel 2.2	Nilai Maksimum dan Minimum setiap Komponen	10
Tabel 4.1	Kabupaten dan Kota dengan Urutan IPM Tertinggi dan Terendah, 2008-2010 ...	21
Tabel 4.2	Kabupaten/Kota yang Mencatat Kemajuan Baik Selama 2009-2010	23
Tabel 4.3	Status Pembangunan Kabupaten/Kota 2008-2010.....	24

<http://ntt.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Diagram Penghitungan IPM	6
Gambar 3.1	Perkembangan IPM NTT, 2005-2010	12
Gambar 3.2	Reduksi <i>Shortfall</i>	13
Gambar 3.3	Perkembangan Angka Harapan Hidup (e_0) 2005-2010	14
Gambar 3.4	Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH 2005-2010.....	15
Gambar 3.5	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (MYS) 2005-2010	16
Gambar 3.6	Perkembangan Rata-rata Pengeluaran Riil (PPP) 2005-2010	17
Gambar 4.1	Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di NTT 2008-2010	21
Gambar 4.2	Kabupaten/Kota dengan IPM Tertinggi dan Reduksi <i>Shortfall</i> , 2008-2010	22
Gambar 4.3	Kabupaten/Kota dengan IPM Terendah dan Reduksi <i>Shortfall</i> , 2008-2010.....	23
Gambar 4.4	Status Pembangunan Kabupaten/Kota Menurut Pulau 2010	25
Gambar 5.1	Rata-rata Pertumbuhan PDRB per Kapita dan Reduksi <i>Shortfall</i> IPM (2008-2010)	28
Gambar 5.2	PDRB per Kapita 2010 (ribu Rupiah) dan IPM 2010	31

RINGKASAN EKSEKUTIF

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang diukur dari tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat yang diukur dengan angka harapan hidup (AHH) saat kelahiran, pengetahuan diukur dengan angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (MYS), serta standar hidup layak yang diukur dengan kemampuan daya beli (*purchasing power parity=PPP*).

Pada periode 2005-2010 IPM NTT meningkat dari tahun ke tahun demikian juga dengan keempat komponennya, namun peringkatnya masih menempati urutan ke 31 dari 33 provinsi di Indonesia atau peringkat tiga terbawah. Pada tahun 2010, IPM NTT mencapai 67,26 dengan AHH sebesar 67,5 tahun, MYS sebesar 7,0 tahun atau setingkat kelas 7, AMH sebanyak 88,59 persen dan pengeluaran per kapita per tahun sebesar Rp. 603.750,-.

Angka IPM dan keempat komponennya bervariasi antar kabupaten/kota. Pada tahun 2010, Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi merupakan wilayah dengan capaian IPM tertinggi (77,31), diikuti kabupaten Ngada (69,45) dan Alor (68,48). Sedangkan kabupaten Sabu Raijua (55,54) memiliki capaian IPM terendah, diikuti kabupaten Sumba Tengah (60,80) dan Sumba Barat Daya (60,99) yang merupakan daerah pemekaran.

Kondisi pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Sumba Barat dan Sikka dinilai berkualitas karena hubungan antara laju pertumbuhan PDRB per kapita dengan pembangunan manusianya kuat, sebaliknya dengan Kabupaten Rote Ndao, Manggarai Barat, Lembata, Timor Tengah Selatan, Sumba Barat Daya, Belu, Flores Timur, Sumba Timur, Manggarai dan Nagekeo menunjukkan hubungan antara laju pertumbuhan PDRB per kapita dengan pembangunan manusianya lemah.

Upaya Pemerintah Daerah dalam memacu pembangunan manusia di NTT dirumuskan dalam 8 (delapan) agenda pembangunan. Untuk dimensi kesehatan dilakukan melalui pembenahan pelayanan medis, penyediaan sarana prasarana dan tenaga medis secara terus dari waktu ke waktu, serta peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan, kesejahteraan anak serta partisipasi pemuda. Sedangkan peningkatan dimensi pendidikan dilakukan melalui pemantapan kualitas pendidikan dan pembenahan fasilitas gedung pelayanan pendidikan. Peningkatan dimensi daya beli dilakukan melalui pembenahan terhadap semua sektor ekonomi, mendukung animo pelaku bisnis, pembenahan berbagai sarana dan infrastruktur pelengkapannya, pembenahan sistem hukum (Daerah), keadilan serta pelayanan masyarakat secara tepat aturan, tepat orang, dan tepat waktu, melakukan konsolidasi tata ruang dan melaksanakan penanggulangan kemiskinan, pembangunan daerah perbatasan, pembangunan daerah kepulauan serta penanganan korban bencana.

PENDAHULUAN



<http://ntt.bps.go.id>

1.1 Latar Belakang

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang dapat menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara/wilayah dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu *longevity*/umur panjang dan sehat yang diukur dengan angka harapan hidup (AHH) saat kelahiran, *knowledge*/pengetahuan diukur dengan angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (MYS), serta *decent living standard*/standar hidup layak yang diukur dengan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*).

Pengukuran IPM terkait dengan indikator-indikator lain sebagai pendukungnya, dimana setiap perubahan pada indikator tersebut memberikan pengaruh terhadap pembangunan manusia. Seperti dalam mengukur angka harapan hidup maka terlebih dahulu harus ditentukan tingkat kematian penduduk. Tingkat kematian ditentukan oleh beberapa faktor antara lain ketersediaan pangan, kemiskinan, keadaan gizi, penyakit menular, keadaan fasilitas kesehatan, kecelakaan, bencana dan kelaparan massal.

Modal manusia merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu dalam rangka memicu pertumbuhan ekonomi perlu pula dilakukan pembangunan manusia (Aloysius, 2009). Menurut UNDP (*Human Development Report*, 1996) hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi bersifat timbal balik. Kinerja ekonomi mempengaruhi pembangunan manusia melalui tingkat pendapatan, distribusi pendapatan dalam masyarakat, termasuk peran perempuan dan pemerintah. Sedangkan pembangunan manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang baik sangat menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Kemajuan pada indikator sosial seperti pendidikan dan kesehatan sangat penting sebagai investasi untuk membangun manusia. Pendidikan dan kesehatan yang baik memungkinkan manusia untuk meningkatkan taraf hidupnya kearah yang lebih baik.

Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah kepulauan sekaligus provinsi yang terletak di selatan khatulistiwa pada posisi 8° - 12° Lintang Selatan dan 118° - 125° Bujur Timur dengan luas wilayah daratan 47.349,90 km² dan luas wilayah perairan 200.000 km. Hampir semua pulau di wilayah NTT terdiri dari pegunungan dan perbukitan kapur. Mengingat NTT terletak cukup dekat dengan Australia maka arus angin yang banyak mengandung uap air dari Asia dan Samudera Pasifik yang sampai di wilayah NTT, kandungan uap airnya sudah berkurang sehingga mengakibatkan hari hujan di NTT lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah lain.

Secara administratif, Nusa Tenggara Timur terdiri dari 20 kabupaten yang kemudian telah bertambah menjadi 21 kabupaten (karena pada tahun 2009 telah dibentuk Kabupaten Sabu Raijua). Pendapatan utama masyarakat NTT berasal dari sektor pertanian, baik tanaman pangan

maupun peternakan dan hasil hutan. Apabila dilihat dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pada tahun 2010 NTT berada di peringkat 31 dari 33 provinsi di Indonesia.

Publikasi ini menyajikan perkembangan angka Indeks Pembangunan Manusia Provinsi NTT agar dapat dilihat bagaimana perkembangan masing-masing komponen dasar penyusun IPM serta dicoba menganalisis hubungan IPM dengan salah satu indikator perekonomian yaitu PDRB.. Dengan demikian, setelah mengetahui perkembangan angka IPM diharapkan dapat diketahui apakah masing-masing komponen tersebut mengalami peningkatan.

1.2 Tujuan Penulisan

Secara umum, publikasi ini akan menyajikan data dan analisis IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2005-2010 dan kabupaten/kota di wilayah tersebut periode 2008-2010. Akan tetapi, hanya angka IPM 20 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur yang dapat diperbandingkan dalam periode 2008-2010 karena angka IPM untuk Kabupaten Sabu Raijua baru tersedia untuk tahun 2009 (belum dapat dilihat perkembangannya selama tiga tahun terakhir) karena masih merupakan kabupaten baru. Data IPM secara lengkap dapat dilihat pada tabel lampiran. Untuk melihat perkembangan IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur digunakan data IPM tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, publikasi ini juga akan menganalisis perkembangan masing-masing komponen IPM serta akan diulas disparitas IPM antar daerah.

Secara khusus, publikasi ini bertujuan untuk:

1. Menyajikan analisis perkembangan IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur dan komponennya.
2. Menyajikan analisis perkembangan IPM antar kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur dan komponennya.
3. Melihat kecenderungan pengaruh indikator ekonomi terhadap pembentukan Indeks Pembangunan Manusia.

1.3 Sistematika Penulisan

Publikasi ini terdiri atas lima bab, Bab I menyajikan latar belakang penulisan. Bab tersebut menjelaskan pentingnya IPM sebagai ukuran untuk melihat kemajuan dalam pembangunan manusia. Metodologi penghitungan IPM disajikan pada Bab II, menjelaskan tentang metode penghitungan masing-masing komponen hingga terbentuknya IPM. Selanjutnya pada Bab III disajikan hasil-hasil analisis IPM dan perkembangan komponennya. Bab IV menjelaskan mengenai disparitas IPM antar kabupaten/kota di NTT. Analisis keterkaitan IPM dengan indikator ekonomi yaitu PDRB per kapita disajikan pada Bab V.

1.4 Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan adalah Susenas Kor dan Susenas Modul Konsumsi. Sebagai penunjang digunakan data Supas, Proyeksi Penduduk (SP 2000) dan Indeks Harga Konsumen (IHK). Data Susenas Kor digunakan untuk menghitung dua indikator pembentuk IPM yaitu indikator Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS). Sementara Angka Harapan Hidup (e_0) dihitung menggunakan data Susenas yang dikoreksi dengan data Supas dan Proyeksi Penduduk. Sedangkan indikator daya beli atau PPP (*Purchasing Power Parity*) dihitung menggunakan data Susenas modul konsumsi yang didasarkan pada 27 komoditas (lihat Tabel 2.1). Untuk mendapatkan pengeluaran per kapita riil digunakan Indeks Harga Konsumen sebagai deflator.

<http://ntt.bps.go.id>

**METODOLOGI
PENGHITUNGAN
IPM**



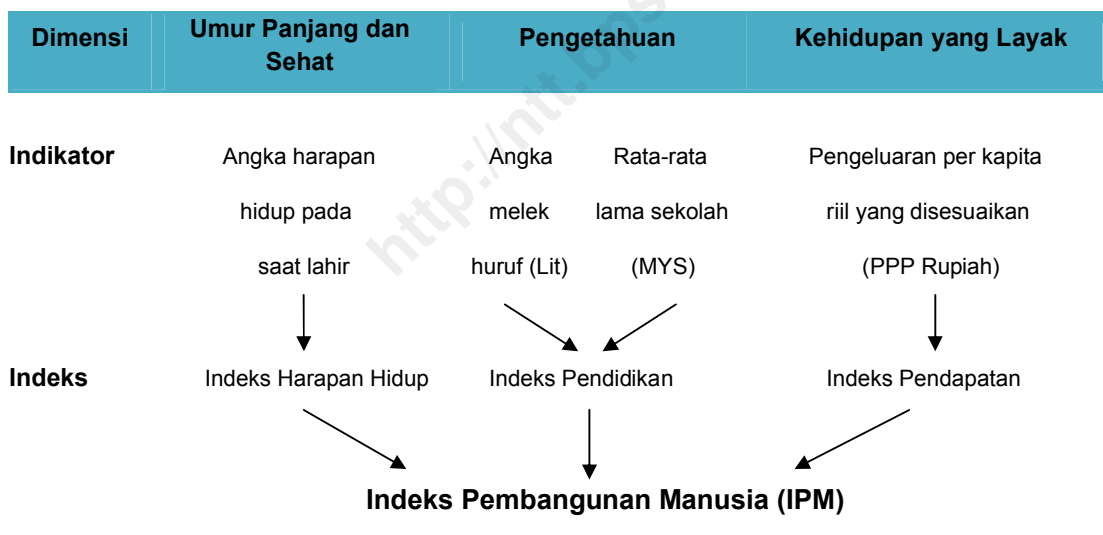
<http://ntt.bps.go.id>

2.1 Pengertian IPM

Secara khusus, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan; angka melek huruf dan rata-rata lamanya bersekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan; dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan dan kehidupan yang layak (Gambar 2.1). Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*).

Gambar 2.1 Diagram Penghitungan IPM



2.2 Komponen Indeks Pembangunan Manusia

2.2.1 Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Angka harapan hidup dihitung menggunakan pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Ada dua jenis data yang digunakan dalam penghitungan Angka Harapan Hidup yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program

Mortpack digunakan untuk menghitung angka harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya dipilih metode *Trussel* dengan model *West*, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya (Preston, 2004).

Melalui program *Mortpack*, dihasilkan estimasi angka harapan hidup 4 tahun sebelum tahun survei. Maka untuk mendapatkan angka harapan hidup pada tahun survei dilakukan *fitting model* dari beberapa *history*. Untuk mendapatkan angka harapan hidup waktu lahir tahun 2010, digunakan beberapa sumber data yaitu Sensus Penduduk, SUPAS, dan Susenas. Selanjutnya dilakukan *fitting model* untuk mendapatkan angka harapan hidup tahun 2010.

Sementara itu untuk menghitung indeks harapan hidup digunakan nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, dimana angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 25 tahun.

2.2.2 Tingkat Pendidikan

Untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk digunakan dua indikator, yaitu rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) dan angka melek huruf. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Sedangkan angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Pada proses penghitungannya, kedua indikator tersebut digabung setelah masing-masing diberikan bobot. Rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga dan angka melek huruf diberi bobot dua pertiga.

Untuk penghitungan indeks pendidikan, dua batasan dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Batas maksimum untuk angka melek huruf, adalah 100 sedangkan batas minimum 0. Hal ini menggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis, dan nilai nol mencerminkan kondisi sebaliknya. Sementara batas maksimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun. Batas maksimum 15 tahun mengindikasikan tingkat pendidikan maksimum yang ditargetkan adalah setara lulus Sekolah Menengah Atas.

2.2.3 Standar Hidup Layak

Dimensi ketiga dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson.

METODOLOGI PENGHITUNGAN IPM

$$\begin{aligned} () &= () && \text{Jika } () < \\ &= + 2 () - && \text{Jika } < () < 2 \\ &= + 2 () + 3 () - 2 && \text{Jika } 2 < () < 3 \\ &= + 2 () + 3 () + 4 () - 3 && \text{Jika } 3 < () < 4 \end{aligned}$$

dan seterusnya.

dimana

$()$ = PPP dari nilai riil pengeluaran per kapita.

Z = Batas tingkat pengeluaran yang ditetapkan secara arbiter adalah sebesar Rp 549.500,- per kapita per tahun atau Rp 1.500,- per kapita per hari.

Penghitungan daya beli (PPP) dilakukan berdasarkan 27 komoditas kebutuhan pokok seperti terlihat dalam tabel 2.1. Batas maksimum dan minimum penghitungan daya beli digunakan seperti terlihat dalam tabel 2.2. Batas maksimum daya beli adalah sebesar Rp 732.720,- sementara sampai dengan tahun 1996 batas minimumnya adalah Rp 300.000,-. Pada tahun 1996 dengan mengikuti kondisi pasca krisis ekonomi batas minimum penghitungan PPP diubah dan disepakati menjadi Rp360.000,-.

Tabel 2.1 Komoditi Kebutuhan Pokok Sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli (PPP)

Komoditas	Unit	Proporsi dari total konsumsi (%)
1. Beras Lokal	Kg	7,25
2. Tepung Terigu	Kg	0,10
3. Singkong	Kg	0,22
4. Tuna /cakalang	Kg	0,50
5. Teri	Ons	0,32
6. Daging sapi	Kg	0,78
7. Ayam	Kg	0,65
8. Telur	Butir	1,48
9. Susu kental manis	397 Gram	0,48
10. Bayam	Kg	0,30
11. Kacang panjang	Kg	0,32

Komoditas	Unit	Proporsi dari total konsumsi (%)
12. Kacang tanah	Kg	0,22
13. Pepaya	Kg	0,18
14. Kelapa	Butir	0,56
15. Gula	Ons	1,61
16. Kopi	Ons	0,60
17. Garam	Ons	0,15
18. Merica	Ons	0,13
19. Mie instan	80 Gram	0,79
20. Rokok kretek	10 Batang	2,86
21. Listrik	Kwh	2,06
22. Air minum	M ³	0,46
23. Bensin	Liter	1,02
24. Minyak tanah	Liter	1,74
25. Sewa rumah	Unit	11,56
Total		37,52

2.3 Penyusunan Indeks

Sebelum penghitungan IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksinya. Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks } (i, j) = \frac{(X_{ij} - X_{i\min})}{(X_{i\max} - X_{i\min})} \dots\dots (1)$$

(i, j) = Indeks komponen ke-i dari daerah j

$X_{i\min}$ = Nilai minimum dari X_i

$X_{i\max}$ = Nilai maksimum dari X_i

METODOLOGI PENGHITUNGAN IPM

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2 Nilai Maksimum dan Minimum setiap Komponen IPM

Komponen IPM	Maksimum	Minimum	Keterangan
1. Angka Harapan Hidup	85	25	Standar UNDP
2. Angka Melek Huruf	100	0	Standar UNDP
3. Rata-rata Lama Sekolah	15	0	Standar UNDP
4. Daya Beli	732.720 ^a	300.000 ^b 360.000 ^c	UNDP menggunakan PDB Riil yang disesuaikan

Keterangan: ^{a)} Perkiraan maksimum pada akhir PJP II tahun 2018
^{b)} Batas sampai dengan tahun 1996
^{c)} Penyesuaian garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan baru (tahun 1999,2002)

Dari gambar 2.1 terlihat bahwa untuk menghitung IPM, terlebih dahulu dihitung Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan dan Indeks Pendapatan. Penghitungan masing-masing indeks dilakukan mengikuti rumus nomor 1. Selanjutnya nilai IPM dapat dihitung sebagai:

$$\dots (2)$$

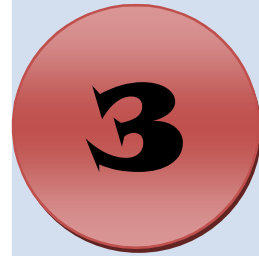
dimana:

$(,)$ = Indeks komponen IPM ke-I untuk wilayah ke-j;

$i = 1, 2, 3$

$j = 1, 2, \dots, k$ wilayah

**HASIL-HASIL
IPM**



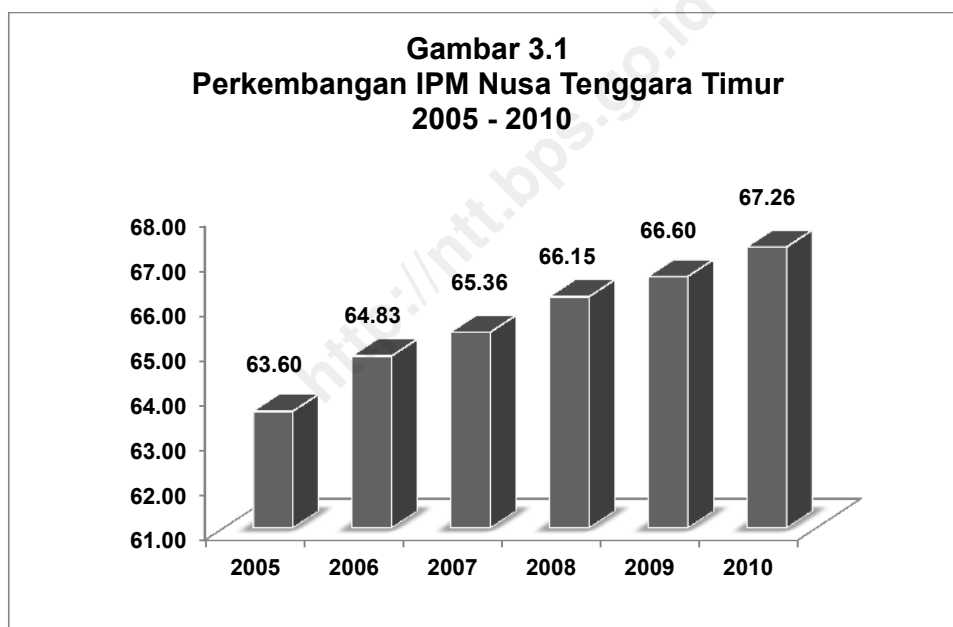
<http://ntt.bps.go.id>

Pembangunan manusia merupakan model pembangunan yang bertujuan untuk memperluas peluang agar penduduk dapat hidup layak. Tujuan tersebut akan dapat tercapai jika setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat dan panjang, untuk berpendidikan dan berketrampilan serta mempunyai pendapatan yang diperlukan untuk hidup.

Suatu ukuran standar pembangunan manusia yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran kualitas hidup yang dibentuk melalui tiga dimensi dasar. Angka IPM kurang memiliki makna apabila dalam analisis tidak menyertakan angka IPM tahun sebelumnya atau daerah lainnya sehingga akan dapat diketahui posisi pembangunan manusia baik antar waktu maupun antar daerah.

Data IPM menjadi sangat penting bernilai strategis dan dibutuhkan oleh banyak kalangan terutama pemerintah sebagai bahan rujukan dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintah. Salah satu kebijakan pemerintah adalah penentuan dana perimbangan daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang salah satu alokatornya adalah IPM. Selain itu, IPM juga digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja pembangunan manusia.

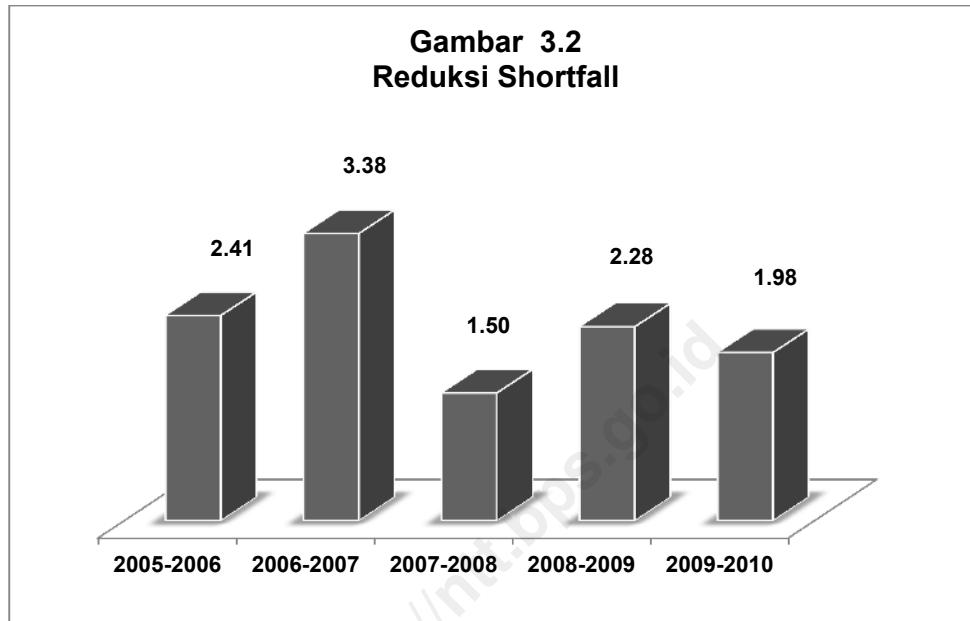
3.1 Perkembangan IPM Nusa Tenggara Timur



Sumber: Diolah dari tabel lampiran

Secara umum pembangunan manusia di Nusa Tenggara Timur selama periode 2005-2010 mengalami peningkatan. Tahun 2005 angka IPM Nusa Tenggara Timur hanya sebesar 63,60 kemudian meningkat menjadi 64,83 pada tahun 2006 dan menjadi sebesar 65,36 pada tahun 2007. Pada tahun 2008 angka IPM Nusa Tenggara Timur kembali meningkat menjadi 66,15 dan menjadi 66,60 pada tahun 2009. Tahun 2010 angka IPM menjadi sebesar 67,26. Dilihat dari peringkatnya diantara provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, IPM NTT menduduki peringkat 28 pada tahun 2004 dan menjadi 31 pada periode 2005-2010.

Pola perkembangan IPM selama periode 2005-2010 menunjukkan adanya fluktuasi jarak IPM terhadap nilai idealnya (100) yang direpresentasikan dengan ukuran reduksi shortfall. Seperti terlihat pada gambar 3.2, reduksi shortfall pada periode 2005-2006 bernilai 2,41, artinya bahwa selama periode tersebut IPM semakin mendekati nilai idealnya yang berarti kualitas hidup penduduk NTT pada periode tersebut membaik. Kemudian pada periode berikutnya (2006-2007) reduksi shortfall semakin meningkat menjadi 3,38, hal ini menunjukkan bahwa capaian peningkatan kualitas hidup penduduk semakin meningkat.



Sumber: Diolah dari tabel lampiran

Akan tetapi, pada periode 2007-2008 nilai reduksi shortfall hanya sebesar 1,50. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai IPM tetap mengalami peningkatan, tetapi peningkatan angka IPM yang terjadi pada periode tersebut lebih kecil dibandingkan peningkatan yang terjadi pada periode sebelumnya (2006-2007). Pada periode 2008-2009, reduksi shortfall kembali meningkat menjadi sebesar 2,28 tetapi pada periode 2009-2010 kembali menurun menjadi sebesar 1,98.

Disadari, memang tidak mudah untuk meningkatkan komponen IPM seperti angka harapan hidup dan rata-rata lamanya sekolah karena harapan hidup sangat tergantung dari angka kematian dalam periode tertentu, sementara rata-rata lamanya sekolah sangat tergantung dari partisipasi sekolah untuk semua kelompok umur. Yang paling memungkinkan untuk mempercepat laju IPM adalah dengan meningkatkan kemampuan daya beli penduduk (Razali, opini Kompas).

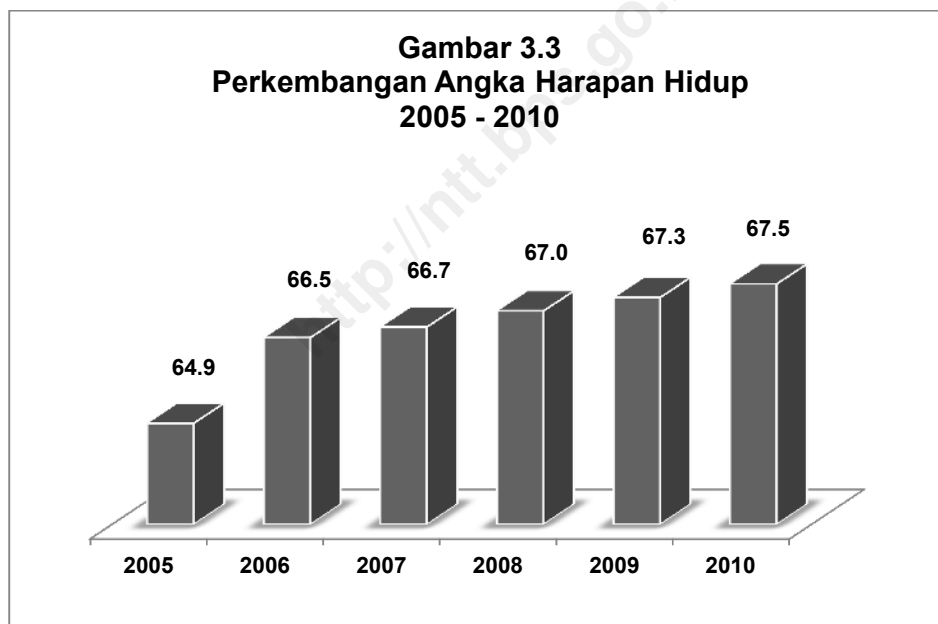
3.2 Perkembangan Komponen IPM

Pada subbab berikut ini akan dijelaskan mengenai perkembangan masing-masing komponen IPM (akan dibahas secara terpisah).

3.2.1 Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (e_0) adalah perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Indikator ini sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk khususnya di bidang kesehatan. Gambar 3.3 memperlihatkan perkembangan angka harapan hidup selama kurun waktu lima tahun terakhir. Pada gambar tersebut terlihat, selama periode 2005-2010 perkembangan angka harapan hidup menunjukkan peningkatan.

Pada tahun 2005, angka harapan hidup penduduk Nusa Tenggara Timur adalah 64,9 tahun yang kemudian menjadi 66,5 tahun pada 2006. Tahun 2007 angka harapan hidup mencapai 66,7 tahun dan tahun 2008 sebesar 67,0 tahun. Tahun 2009, angka harapan hidup penduduk NTT mencapai 67,3 tahun dan tahun 2010 menjadi 67,5 tahun. Peningkatan angka harapan hidup menunjukkan bahwa beberapa program pemerintah NTT di bidang kesehatan cukup berhasil, meski masih terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) seperti busung lapar dan gizi buruk, namun pelayanan medis dan penyediaan sarana prasarana (infrastruktur kesehatan) serta tenaga medis terus dibenahi dari waktu ke waktu. Pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan rujukan pasien masyarakat miskin, pengobatan penyakit kronis, semakin dioptimalkan.



Sumber: Diolah dari tabel lampiran

Selain itu, pemerintah juga melakukan peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan, kesejahteraan anak dan partisipasi pemuda di bidang kesehatan yang dilakukan melalui:

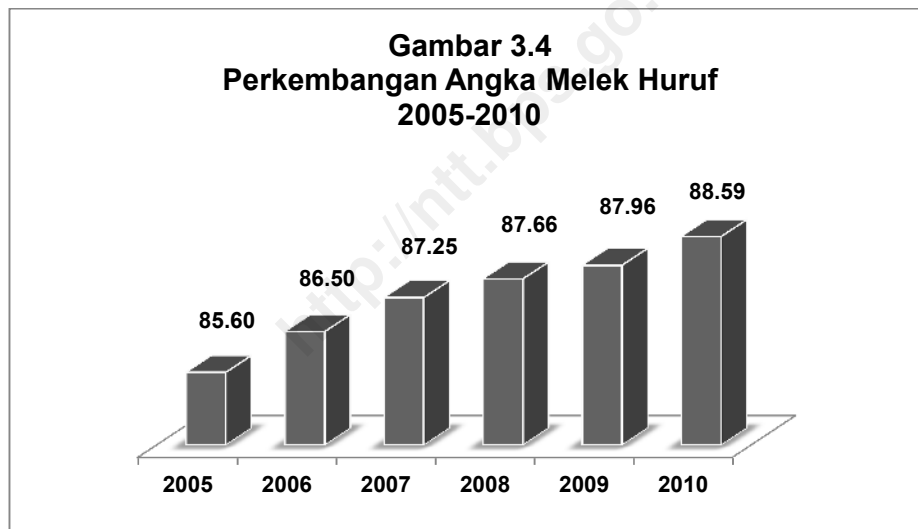
- a) Gerakan sayang Ibu/anak, pembentukan pusat pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak,

- b) Pelayanan kesejahteraan sosial anak di luar panti kepada Anak Terlantar, Anak Jalanan dan Anak Nakal serta Penanganan anak melalui Panti Asuhan Anak yang ada.
- c) Penanganan masalah ketunaan sosial termasuk korban napza dan HIV/AIDS dengan kelompok sasaran seperti Pekerja Seks Komersial, Waria, Eks Narapidana, Korban Napza dan Penderita HIV/AIDS.
- d) Perhatian juga diberikan kepada para penyandang cacat, Anak Cacat serta Eks Penderita Penyakit Kronis.

3.2.2 Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah

Indikator pendidikan yang merepresentasikan dimensi pengetahuan dalam IPM adalah angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Kedua indikator ini juga dapat dimaknai sebagai ukuran sumber daya manusia.

Angka Melek Huruf (AMH) selama periode 2005-2010 menunjukkan perkembangan meningkat seperti yang terlihat pada gambar 3.4. Secara teori, angka melek huruf memang seharusnya mengalami peningkatan dari waktu ke waktu agar dapat mengindikasikan bahwa perbaikan di bidang pendidikan mengalami kemajuan.



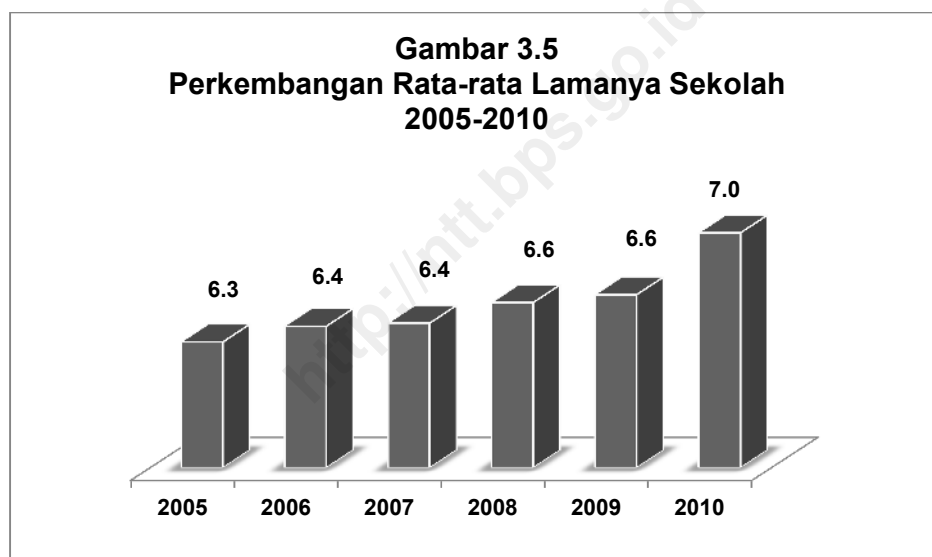
Sumber: Diolah dari tabel lampiran

Di bidang pendidikan, pemerintah NTT telah melakukan upaya pembangunan diantaranya sebagai berikut:

- a) Pemantapan kualitas pendidikan yang diharapkan mampu memberi hasil berupa peningkatan mutu kelulusan pendidikan
- b) Terus melakukan pembenahan terhadap infrastruktur pendidikan
- c) Percepatan pemberantasan buta aksara perempuan
- d) Pemberdayaan pemuda yang telah dilakukan melalui Karang Taruna, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta organisasi profesi pemuda lainnya.

Tahun 2005 angka melek huruf Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 85,60 persen kemudian meningkat menjadi sebesar 86,50 persen pada 2006. Pada tahun 2007 sebesar 87,25 persen dan tahun 2008 sebesar 87,66 persen. Tahun 2009, angka melek huruf Nusa Tenggara Timur kembali meningkat hingga mencapai 87,96 persen dan tahun 2010 menjadi 88,59 persen. Secara umum peningkatan kemampuan baca tulis penduduk Nusa Tenggara Timur usia 15 tahun ke atas selama periode 2005-2010 cukup baik.

Sebagian masyarakat Nusa Tenggara Timur khususnya yang bertempat tinggal di wilayah pedesaan berpendapat bahwa pendidikan tidak membawa perubahan hidup karena banyak sarjana dan lulusan sekolah menengah yang masih menganggur di desa-desa. Selain itu kemiskinan, kesulitan ekonomi, keterbatasan biaya hidup, serta kendala sarana transportasi yang tidak menjangkau desa-desa terpencil di NTT membuat masyarakat pasrah pada nasib. Mereka menjadi kurang peduli terhadap pendidikan atau pembangunan secara keseluruhan, mereka hanya berjuang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan sebagian dari mereka juga ada yang mengalami putus sekolah sehingga sangat berpengaruh terhadap perkembangan komponen rata-rata lama sekolah.



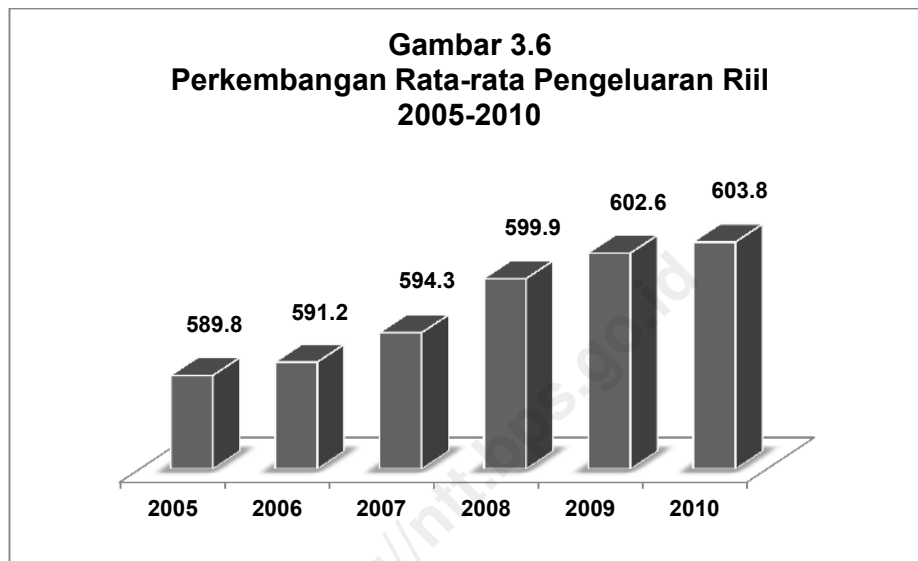
Sumber: Diolah dari tabel lampiran

Selama periode 2005-2010, rata-rata lama sekolah penduduk Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan seperti yang terlihat pada gambar 3.5, walaupun peningkatan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2005 rata-rata lama sekolah penduduk Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 6,3 tahun, meningkat menjadi 6,4 tahun pada periode 2006-2007. Pada periode 2008-2009 rata-rata lama sekolah penduduk Nusa Tenggara Timur menjadi sebesar 6,6 tahun dan pada 2010 sebesar 7,0 tahun.

Dengan demikian, tingkat pendidikan penduduk Nusa Tenggara Timur setara dengan kelas 7. Hal ini menunjukkan bahwa tidak mudah bagi pemerintah untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk.

3.2.3 Daya Beli

Daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya untuk barang dan jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar wilayah karena nilai tukar yang digunakan dapat menurunkan atau menaikkan nilai daya beli. Dengan demikian kemampuan daya beli masyarakat antara satu wilayah dengan wilayah lain berbeda. Perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah masih belum terbanding, untuk itu perlu dibuat standarisasi. Misalnya, satu rupiah di suatu wilayah memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta. Dengan standarisasi ini diharapkan perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah dapat dibandingkan.



Sumber: Diolah dari tabel lampiran

Sebagaimana yang ditunjukkan gambar 3.6, kemampuan daya beli masyarakat tampak terus meningkat. Periode 2005-2010, daya beli masyarakat Nusa Tenggara Timur terlihat mengalami peningkatan meskipun dari kenaikan nilai nominalnya tidak besar. Pada tahun 2005 daya beli masyarakat Nusa Tenggara Timur secara umum adalah sebesar Rp 589,8 ribu yang kemudian meningkat menjadi sebesar Rp 591,2 ribu pada tahun 2006. Tahun 2007 nilai daya beli masyarakat menjadi sebesar Rp 594,3 ribu dan tahun 2008 sebesar Rp 599,9. Peningkatan daya beli kembali terjadi pada tahun 2009 hingga menjadi sebesar Rp 602,6 ribu. Pada tahun 2010 kemampuan daya beli masyarakat Nusa Tenggara Timur mencapai Rp 603,8 ribu.

Kemampuan daya beli berhubungan dengan masalah ekonomi. Dengan demikian di bidang pembangunan ekonomi, pemerintah telah melakukan berbagai upaya antara lain:

- a) melakukan pembenahan terhadap semua sektor secara bertahap baik pertanian, peternakan, UKM, pariwisata, pertambangan, perbankan, swasta nasional dan luar negeri, serta mendukung animo pelaku bisnis dengan memberikan kemudahan perijinan dan kenyamanan fasilitas pendukung lainnya. Khusus kepada para petani, dilakukan perubahan perilaku petani yang semula hanya Tanam – Panen - Jual, berubah menjadi Tanam – Panen – Olah – Jual, serta Mutu dan tampilan produk olahan menjadi lebih baik dan berkualitas ekspor.

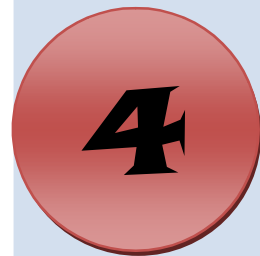
- b) Melakukan pembenahan berbagai sarana yang ada seperti prasarana transportasi perhubungan baik darat, laut, maupun udara serta infrastruktur pelengkap, penyediaan bendungan, bendung dan embung-embung, perbaikan saluran irigasi yang dapat mendukung kegiatan ekonomi.
- c) Penanggulangan kemiskinan menjadi perhatian serius pemerintah daerah (salah satu pelaksanaan agenda khusus pemerintah NTT). Saat ini bekerja sama dengan para Uskup, Ketua Sinode, Ketua MUI, Ketua Parisada Hindu Dharma, dan berbagai organisasi masyarakat dan kepemudaan lainnya, pemerintah daerah sementara melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Keseriusan pemerintah daerah juga mendapat dukungan pemerintah melalui pemberdayaan KUBE, Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta Keluarga Harapan (PKH).

<http://ntt.bps.go.id>

DISPARITAS

ANTAR

WILAYAH



<http://ntt.bps.go.id>

Disparitas pembangunan antar wilayah masih merupakan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Indikator masih tingginya kesenjangan antar daerah dicerminkan kedalam empat masalah yaitu:

- ❖ Disparitas penyebaran penduduk dan ketenagakerjaan.
- ❖ Disparitas tingkat kesejahteraan sosial ekonomi dengan masih rendahnya peningkatan akses pendidikan, melek huruf, dan partisipasi sekolah yang terlihat dari rendahnya Indeks Pembangunan Manusia di seluruh wilayah NTT.
- ❖ Disparitas pertumbuhan ekonomi antar daerah.
- ❖ Disparitas prasarana antar daerah yang sangat tinggi.

Secara khusus, disparitas tingkat kesejahteraan sosial ekonomi yang tercermin dalam IPM akan dibahas dalam bab ini. Dalam analisis disparitas antar wilayah tidak dapat dilepaskan dari ulasan mengenai capaian IPM antar wilayah. Analisis capaian IPM antar wilayah berisi angka IPM, peringkat IPM dan reduksi *shortfall* provinsi dan kabupaten/kota. Sementara itu disparitas pembangunan manusia lebih merupakan perbandingan IPM antar daerah.

4.1. Capaian IPM Kabupaten/Kota

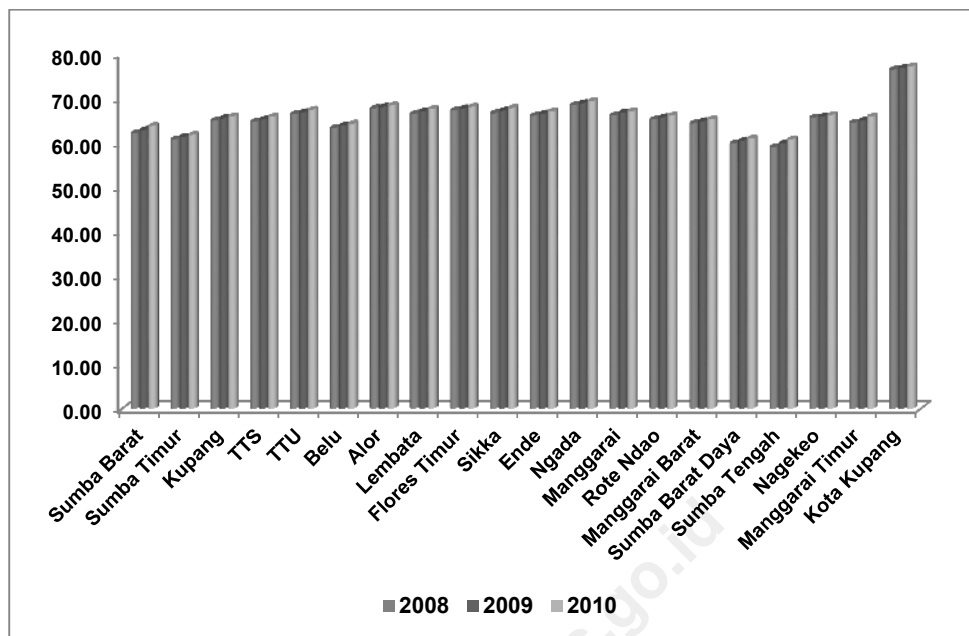
Secara umum, IPM kabupaten/kota menggambarkan kinerja pembangunan manusia pada tingkat kabupaten/kota. Kinerja pembangunan manusia dapat dinilai berhasil atau gagal berdasarkan capaian angka IPM. Selanjutnya, capaian angka IPM itu akan menentukan urutan (ranking) suatu wilayah. Untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia, barangkali tidak mutlak dari urutan posisi (ranking), akan tetapi berdasarkan reduksi *shortfall*. Berdasarkan ukuran itu terlihat seberapa besar akselerasi capaian pembangunan manusia.

Selama tiga tahun terakhir IPM 20 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur (belum termasuk Kabupaten Sabu Raijua karena masih merupakan kabupaten baru) menunjukkan perkembangan meningkat. Seperti terlihat pada gambar 4.1, tiga kabupaten yang selalu tercatat sebagai kabupaten/kota dengan pencapaian angka IPM tertinggi selama periode 2008-2010 adalah Kota Kupang, Kabupaten Ngada dan Kabupaten Alor. Sedangkan Kabupaten Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Sumba Barat dan Belu adalah lima kabupaten yang memiliki angka IPM terendah selama periode tersebut.

Pada tahun 2010, angka IPM untuk Kota Kupang mencapai 77,31; Kabupaten Ngada sebesar 69,45 dan Kabupaten Alor sebesar 68,48. Sementara itu, IPM tahun 2010 untuk Kabupaten Sumba Tengah adalah sebesar 60,80; Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar 60,99; Kabupaten Sumba Timur sebesar 61,80; Kabupaten Sumba Barat sebesar 63,85; dan Kabupaten Belu sebesar 64,34. Dengan demikian, *range* (selisih perbedaan) antara angka IPM tertinggi dengan angka IPM terendah tahun 2010 adalah sebesar 16,51, selisih tersebut lebih kecil

dibandingkan selisih pada tahun 2009 yaitu sebesar 17,11. Angka IPM Kabupaten Sabu Raijua belum dapat dibandingkan karena masih merupakan kabupaten yang baru terbentuk.

Gambar 4.1 Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di NTT 2008-2010



Sumber: Diolah dari tabel lampiran

Tabel 4.1 Kabupaten dan Kota dengan Urutan IPM Tertinggi dan Terendah, 2008-2010

Tertinggi			
Kabupaten/Kota	2008	2009	2010
Kota Kupang	76,58	76,94	77,31
Ngada	68,56	69,01	69,45
Alor	67,82	68,16	68,48
Terendah			
Kabupaten/Kota	2008	2009	2010
Sumba Tengah	59,01	59,84	60,80
Sumba Barat Daya	59,87	60,54	60,99
Sumba Timur	60,80	61,41	61,80
Sumba Barat	62,17	62,90	63,85
Belu	63,41	63,91	64,34

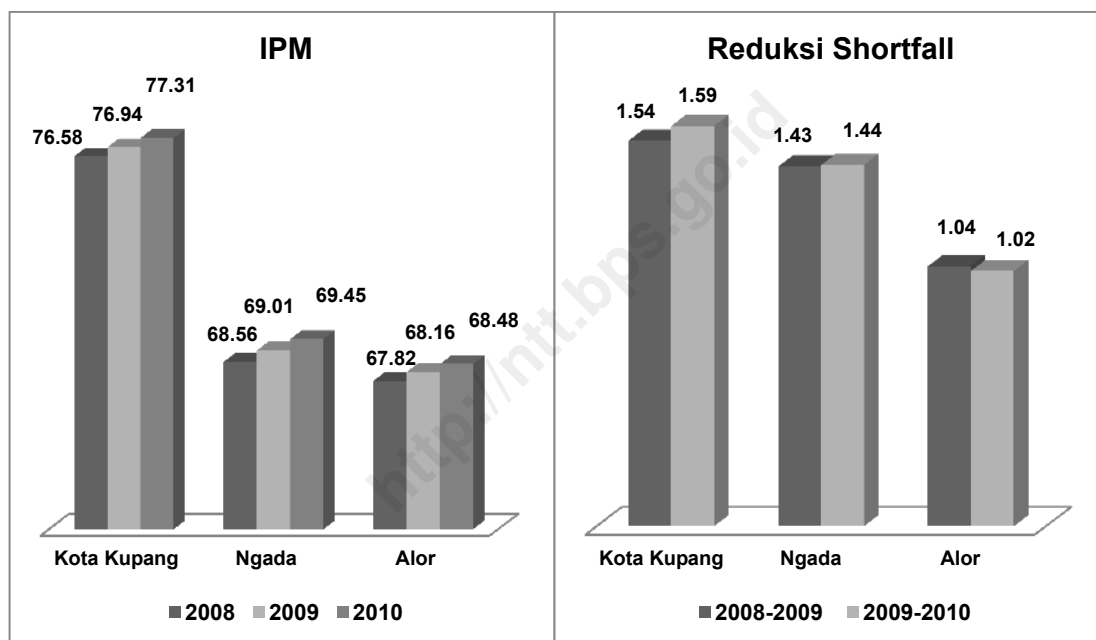
Sumber: Diolah dari lampiran

DISPARITAS ANTAR WILAYAH

Meskipun Kabupaten Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Sumba Barat dan Belu merupakan kabupaten dengan IPM terendah, tetapi dari perkembangan IPM kelima kabupaten tersebut menunjukkan peningkatan. Hanya saja dari segi kecepatan, peningkatan IPM kabupaten tersebut tidak secepat peningkatan IPM kabupaten lainnya.

Laju kecepatan peningkatan IPM masing-masing kabupaten/kota berbeda. Kecepatan peningkatan IPM ini secara umum sangat tergantung dari tinggi rendah angka IPM yang dicapai. Sebagai ilustrasi, kabupaten/kota cukup sulit untuk meningkatkan angka IPM dengan kondisi angka IPM yang tergolong tinggi (*hardrock*). Sebaliknya, sangat mudah bagi kabupaten/kota yang masih memiliki IPM tergolong rendah untuk meningkatkan kecepatan peningkatan IPM (*softrock*). Akan tetapi, di Provinsi Nusa Tenggara Timur terjadi kondisi yang sebaliknya untuk beberapa kabupaten sebagaimana yang terlihat pada gambar 4.2 dan gambar 4.3.

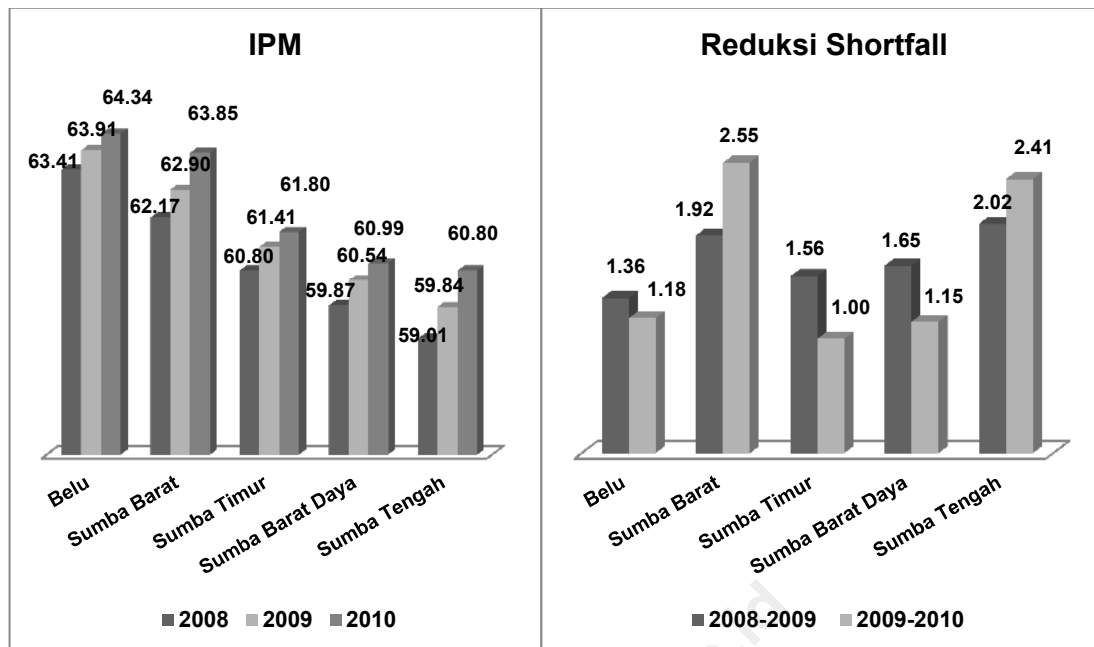
Gambar 4.2 Kabupaten/Kota dengan IPM Tertinggi dan Reduksi *Shortfall*, 2008-2010



Sumber: Diolah dari tabel lampiran

Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Tengah memiliki reduksi *shortfall* yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Kupang, Kabupaten Ngada dan Alor. Meskipun Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Tengah termasuk kabupaten dengan IPM rendah tetapi telah memiliki kemampuan peningkatan IPM yang lebih cepat apabila dibandingkan dengan kecepatan peningkatan IPM Kabupaten Alor yang merupakan salah satu kabupaten dengan IPM tinggi. Sedangkan tiga kabupaten dengan IPM terendah lainnya yaitu Kabupaten Belu, Sumba Timur dan Sumba Barat Daya dapat dikatakan memiliki kecepatan peningkatan IPM yang tidak terlalu lambat, karena nilai reduksi *shortfall*-nya tidak terlalu berbeda dengan Kota Kupang dan Kabupaten Ngada.

Gambar 4.3 Kabupaten/Kota dengan IPM Terendah dan Reduksi *Shortfall*, 2008-2010



Sumber: Diolah dari tabel lampiran

Tabel 4.2 Kabupaten/Kota yang Mencatat Kemajuan Baik Selama 2009-2010

Kabupaten/Kota	Reduksi <i>Shortfall</i> (2009-2010)
Manggarai Timur	2,58
Sumba Barat	2,55
Sumba Tengah	2,41
Sabu Raijua	2,22
Timor Tengah Selatan	1,85

Sumber: Diolah dari lampiran

Pada tabel 4.2, dapat dilihat lima kabupaten/kota (termasuk Kabupaten Sabu Raijua) yang memiliki kemampuan yang cukup baik dalam peningkatan IPM selama periode 2009-2010. Kabupaten Manggarai Timur dengan reduksi shortfall sebesar 2,58 mampu mengalahkan kecepatan Kabupaten Sumba Barat, Sumba Tengah, Sabu Raijua dan Timor Tengah Selatan dalam usaha peningkatan IPM maka diharapkan kondisi pembangunan di Kabupaten Manggarai Timur dapat menjadi lebih baik. Meskipun Kabupaten Sabu Raijua tergolong kabupaten yang masih baru, tetapi memiliki kemampuan akselerasi capaian IPM yang cukup baik.

4.2 Status Pembangunan Kabupaten/Kota

Selama periode 2008-2010, IPM di semua kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami kenaikan dengan kecepatan yang bervariasi. Ada sejumlah kabupaten/kota mengalami peningkatan IPM secara cepat dan sebaliknya ada pula kabupaten/kota dengan peningkatan IPM relatif lambat. Namun demikian, dari 20 kabupaten/kota (menjadi 21 kabupaten/kota pada tahun 2009) yang dihitung tidak satupun kabupaten/kota termasuk dalam kategori tinggi, jika diukur menurut skala internasional¹.

Tabel 4.3 Status Pembangunan Kabupaten/Kota, 2008-2010

Status Pembangunan	2008	2009	2010
Rendah	-	-	-
Menengah bawah	11	11	8
Menengah atas	9	9	12
Tinggi	-	-	-

Sumber: Diolah dari lampiran

Periode 2008-2009, berdasarkan skala internasional terdapat 9 dari 20 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur tergolong dalam kategori IPM menengah atas dan sisanya yaitu 11 kabupaten/kota lainnya masuk kategori IPM menengah bawah.

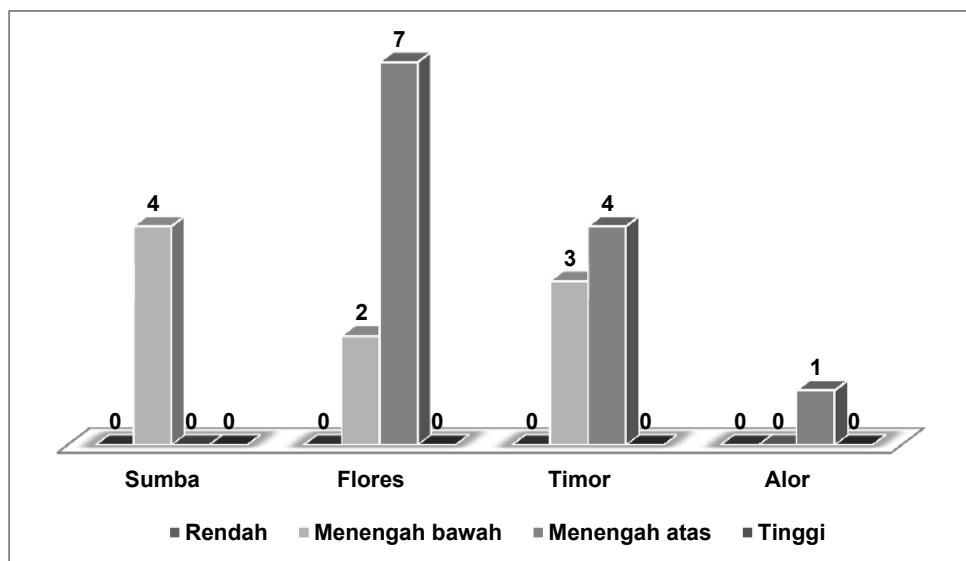
Seperti terlihat pada tabel 4.3, pada tahun 2010 komposisinya berubah semakin baik karena jumlah kabupaten/kota yang masuk kategori IPM menengah atas bertambah menjadi 12 kabupaten/kota dan 8 kabupaten/kota lainnya masuk kategori IPM menengah bawah.

4.3 Disparitas Pembangunan Manusia

Variasi pencapaian pembangunan antar kabupaten/kota memberikan gambaran, adanya ketidakmerataan pembangunan di berbagai sektor pembangunan. Ketidakmerataan ini dapat dilihat dengan menggunakan berbagai indikator sosial dan ekonomi. Keseluruhan indikator sosial dan ekonomi telah terangkum dalam IPM yang merupakan salah satu ukuran pencapaian pembangunan.

¹ Kategori tinggi (IPM \geq 80), kategori menengah atas ($66 \leq$ IPM $<$ 80), kategori menengah bawah ($50 \leq$ IPM $<$ 66), dan kategori rendah (IPM $<$ 50)

Gambar 4.4 Status Pembangunan Kabupaten/Kota Menurut Pulau, 2010



Sumber: Diolah dari tabel lampiran

Gambar 4.4 memperlihatkan pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada gambar tersebut dapat terlihat bahwa semua kabupaten di daratan Sumba masih termasuk kelompok menengah bawah, sedangkan kelompok menengah atas tersebar merata di daratan Flores, Timor dan Alor. Di daratan Flores dan Timor juga masih terdapat wilayah yang masuk dalam kelompok menengah bawah.

**HUBUNGAN IPM
DENGAN INDIKATOR
EKONOMI**



<http://ntt.bps.go.id>

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam pembentukannya merupakan kombinasi dari indikator kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Selain indikator-indikator tersebut IPM berhubungan dengan indikator-indikator sosial maupun ekonomi yang lain. Oleh karena itu, bab ini akan memberikan ulasan mengenai keterkaitan antara IPM dengan beberapa indikator ekonomi yang bertujuan untuk melihat hubungan antara indikator ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia secara lebih teliti.

Bab ini hanya akan membahas mengenai hubungan antara IPM dengan indikator ekonomi (laju pertumbuhan PDRB per kapita dan PDRB per kapita) secara bivariat.

5.1 Hubungan Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita dengan Pembangunan Manusia

Untuk mempercepat peningkatan kemampuan manusia (terutama dalam mencapai kehidupan yang layak) di suatu wilayah diperlukan modal dan investasi yang besar. Investasi tersebut diwujudkan dalam bentuk perbaikan sarana kesehatan, pendidikan dan produktivitas penduduk. Investasi yang besar akan diperoleh melalui laju pertumbuhan PDRB per kapita yang pesat. Selanjutnya, produk dari pembangunan manusia yang berhasil adalah terlahirnya sumber daya manusia yang berkualitas. SDM yang berkualitas merupakan modal utama dalam menggerakkan dan mempercepat laju roda perekonomian.

Senada dengan uraian diatas, UNDP (Laporan Pembangunan Manusia, 1996) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara laju pertumbuhan PDRB per kapita dengan pembangunan manusia, hubungan yang terjadi bersifat timbal balik. Laju pertumbuhan PDRB per kapita berpengaruh terhadap pembangunan manusia, sebaliknya pembangunan manusia juga mempengaruhi laju pertumbuhan PDRB per kapita melalui terciptanya tenaga yang berkualitas. Namun, telah terbukti secara empiris bahwa hubungan yang terjadi tidak bersifat otomatis. Dalam lingkup global, banyak negara yang mengalami laju pertumbuhan PDRB per kapita yang pesat tanpa diikuti dengan peningkatan kinerja pembangunan manusia yang memadai. Namun sebaliknya, banyak pula negara yang mengalami laju pertumbuhan PDRB per kapita yang tidak terlalu cepat tetapi mampu meningkatkan kinerja pembangunan manusia dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam konteks ini, peran pemerintah menjadi sangat penting dalam memperkuat hubungan diantara keduanya melalui kebijakan yang tepat. Kebijakan yang menempatkan laju pertumbuhan PDRB per kapita sebagai sarana dan pembangunan manusia sebagai tujuan akhir.

Dalam publikasi ini, keterkaitan antara laju pertumbuhan PDRB per kapita dengan pembangunan manusia dilihat dalam lingkup kabupaten/kota di wilayah NTT. UNDP mengkategorikan hubungan antara laju pertumbuhan PDRB per kapita dengan pembangunan manusia menjadi hubungan yang seimbang (*balance*) dan tidak seimbang (*unbalance*). Hubungan dikatakan seimbang jika laju pertumbuhan PDRB per kapita maupun pembangunan manusia berlangsung relatif cepat (hubungan yang kuat), atau keduanya berlangsung relatif lambat

HUBUNGAN IPM DENGAN INDIKATOR EKONOMI

(hubungan yang lemah). Sedangkan hubungan dikatakan tidak seimbang apabila laju pertumbuhan PDRB per kapita berlangsung dengan relatif lambat tetapi pembangunan manusia relatif cepat, atau sebaliknya. Dengan menggunakan rata-rata dari nilai seluruh kabupaten/kota sebagai *cut of point*, kabupaten/kota di NTT dapat dikategorikan sesuai dengan pengkategorian UNDP (sebagaimana terlihat pada gambar 5.1).

Gambar 5.1 Rata-rata Pertumbuhan PDRB per Kapita dan Reduksi Shortfall IPM, 2008-2010



Sumber: Diolah dari tabel lampiran

Untuk masing-masing kategori keseimbangan pembangunan, UNDP mengajukan sejumlah rekomendasi kebijakan yang dianggap penting dan disajikan secara singkat. Walaupun rekomendasi yang disajikan masih bersifat umum tetapi tampaknya cukup berharga untuk dipertimbangkan (Rekomendasi UNDP dalam Imawan dan Suhaimi, 1996:17).

- 1. Hubungan yang kuat** (laju pertumbuhan PDRB per kapita dan reduksi *shortfall* IPM cepat). Dalam hubungan ini antara laju pertumbuhan PDRB per kapita dengan pembangunan manusia saling mendorong satu dengan lainnya melalui kebijakan pemerintah. Laju pertumbuhan PDRB per kapita yang relatif cepat dimanfaatkan untuk pembangunan manusia dan penciptaan lapangan kerja, sebaliknya pembangunan manusia yang relatif cepat memberi dampak bagi percepatan laju pertumbuhan PDRB per kapita. Kabupaten/kota yang masuk

kedalam kategori ini adalah Kabupaten Sumba Barat dan Sikka. Untuk masing-masing kabupaten/kota tersebut, diajukan beberapa saran sebagai berikut:

- Perhatian yang lebih besar diarahkan pada pembangunan manusia termasuk masalah kemiskinan, konservasi lingkungan dan regenerasi.
 - Untuk menjamin adanya kesinambungan diupayakan agar pertumbuhan ekonomi tinggi sepenuhnya digunakan untuk pembangunan manusia.
 - Menentukan target segmen penduduk yang tidak memperoleh manfaat sepenuhnya dari pembangunan manusia secara keseluruhan seperti kelompok wanita.
- 2. Hubungan yang lemah** (laju pertumbuhan PDRB per kapita dan reduksi *shortfall* IPM rendah). Dengan laju pertumbuhan PDRB per kapita yang relatif rendah menyebabkan pendanaan dalam investasi untuk pembangunan manusia terutama dalam pencapaian status kesehatan, gizi, dan pendidikan yang lambat penambahannya. Hal tersebut juga menyebabkan peningkatan pendapatan menjadi sulit dicapai. Kabupaten yang masuk kedalam kategori ini adalah Rote Ndao, Manggarai Barat, Lembata, Timor Tengah Selatan, Sumba Barat Daya, Belu, Flores Timur, Sumba Timur, Manggarai dan Nagekeo. Adapun saran bagi kabupaten tersebut adalah:
- Dibutuhkan upaya besar untuk menciptakan dan mempercepat laju pertumbuhan PDRB per kapita melalui pembangunan manusia.
 - Upaya harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan dengan memperbaiki distribusi pendapatan dan dengan memfokuskan pada penciptaan peluang kerja dan penanggulangan kemiskinan.
 - Subsidi *budget* harus disediakan bagi program-program sosial yang menjangkau rakyat banyak, bukan sekelompok elit.
- 3. Hubungan tidak seimbang**
- a. Cepat-Lambat** (laju pertumbuhan PDRB per kapita cepat tetapi reduksi *shortfall* IPM lambat). Kategori ini merupakan kabupaten/kota dengan laju pertumbuhan PDRB per kapita yang tinggi namun kurang berhasil dalam mengonversikannya menjadi pembangunan manusia yang cepat. Namun terdapat juga dalam kategori ini kabupaten yang telah memiliki capaian IPM yang tinggi sehingga kecepatan peningkatannya cenderung melambat. Kabupaten yang masuk kedalam kategori ini adalah Kabupaten Kupang, Ngada, Alor, Timor Tengah Utara, Ende dan Kota Kupang. Adapun saran bagi kabupaten tersebut adalah:
- Diupayakan agar distribusi sumber daya publik dan swasta lebih merata.

- Diupayakan agar pola laju pertumbuhan PDRB per kapita lebih *participatory* dengan menekankan pada penciptaan lapangan kerja pada pekerjaan produktif.
 - Aset-aset produktif dan pendapatan agar didistribusikan dengan menekankan pada sumber daya manusia, bukan sumber daya fisik.
- b. Lambat-Cepat** (laju pertumbuhan PDRB per kapita lambat tetapi reduksi *shortfall* IPM cepat). Kabupaten/kota dalam kategori ini memiliki capaian pembangunan manusia yang relatif cepat namun belum optimal dalam pemanfaatannya untuk mempercepat laju pertumbuhan PDRB per kapita. Kabupaten yang masuk kedalam kategori ini adalah Sumba Tengah dan Manggarai Timur. Untuk masing-masing kabupaten tersebut, diajukan beberapa saran sebagai berikut:
- Hubungan antara pertumbuhan dan kemampuan penduduk diperkuat.
 - Permintaan terhadap sumber daya manusia ditingkatkan melalui investasi pada bidang-bidang produktif yang sesuai dengan komposisi keterampilan penduduk.
 - Upayakan agar penduduk memiliki peluang penuh untuk memanfaatkan kemampuan penduduk yang meningkat.

5.2 Hubungan PDRB per Kapita dengan Pembangunan Manusia

UNDP, dalam publikasi yang sama, menyatakan bahwa tujuan akhir (*ultimate end*) dari pembangunan suatu bangsa adalah pembangunan manusia, sedangkan perekonomian/pertumbuhan ekonomi hanyalah sebagai alat (*a means*) untuk mencapai tujuan akhir tersebut. Sejalan dengan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa bangsa yang berhasil salah satunya adalah bangsa yang mampu mengkonversikan pendapatannya menjadi kapabilitas manusia secara efisien. Oleh karena itu, idealnya semakin tinggi pendapatan suatu bangsa maka semakin tinggi pula capaian kapabilitas manusianya. Terlebih lagi jika dengan pendapatan yang tidak terlalu tinggi, namun mampu memanfaatkannya dengan optimal untuk meningkatkan kapabilitas manusia sehingga terealisasi capaian kapabilitas manusia yang tinggi.

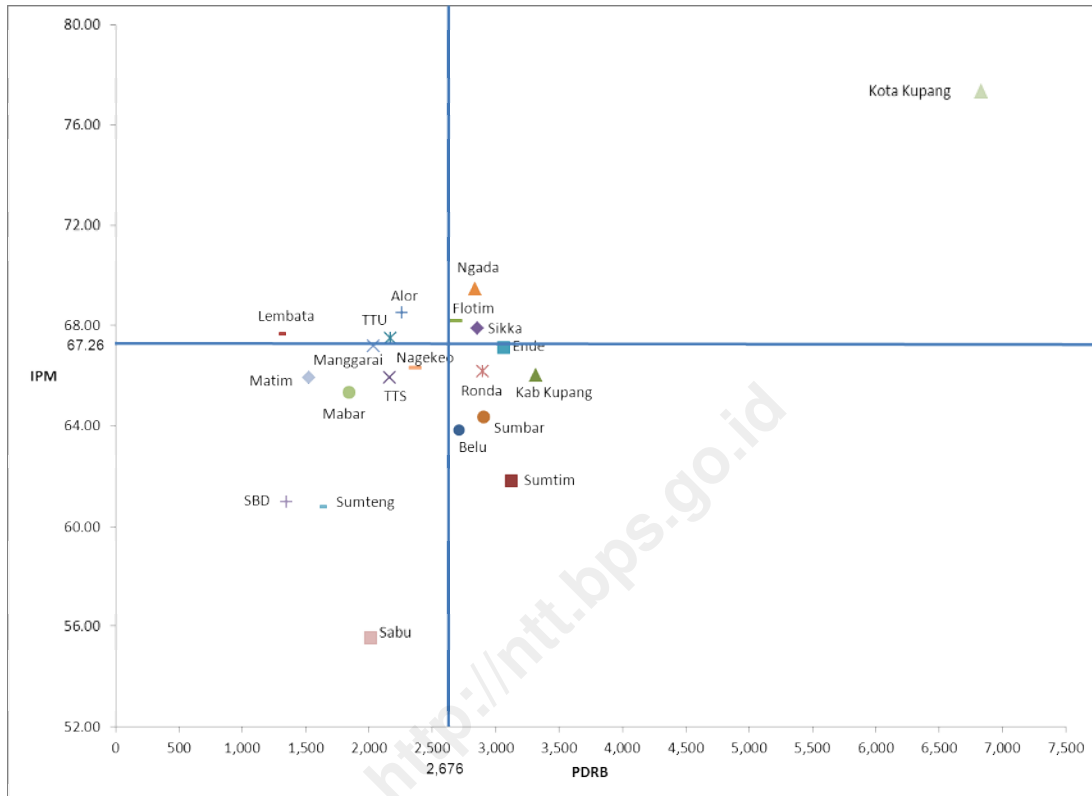
Dalam konteks yang sama namun dalam lingkup kabupaten/kota, kita dapat melihat seefisien apa suatu kabupaten/kota dalam mengkonversikan pendapatannya menjadi kapabilitas manusia dengan cara membandingkan PDRB per kapita dengan pencapaian IPM-nya. Dalam hal ini perlu diingat bahwa IPM dibangun dari beberapa indikator sosial yaitu angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Indikator-indikator tersebut tidak dapat meningkat dalam waktu yang singkat. Begitu juga dengan pengaruh dari pendapatan suatu daerah terhadap capaian IPM-nya. Pengaruhnya tidak berlangsung dalam waktu yang singkat dan dipengaruhi oleh kemampuan masing-masing daerah dalam mengkonversikan pendapatannya menjadi capaian kapabilitas manusia yang tinggi. Capaian IPM pada tahun 2010 misalnya, nilainya tidak hanya

HUBUNGAN IPM DENGAN INDIKATOR EKONOMI

dipengaruhi oleh PDRB per kapita pada tahun yang sama namun dipengaruhi juga oleh PDRB per kapita pada tahun-tahun sebelumnya.

Gambar berikut menyajikan hubungan antara PDRB per kapita dengan pencapaian IPM tahun 2010:

Gambar 5.2 PDRB per Kapita (ribu Rupiah) dan IPM, Tahun 2010



Sumber: Diolah dari tabel lampiran

Pada gambar 5.2, seluruh kabupaten/kota di NTT dibagi kedalam empat kategori. *Cut of point* yang digunakan untuk mengelompokkan kabupaten/kota tersebut adalah angka NTT. Untuk PDRB per kapita digunakan PDRB per kapita Provinsi Nusa Tenggara Timur (2,676 juta Rupiah) dan untuk IPM digunakan IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur (67,26). Kemudian IPM dan PDRB per kapita suatu daerah dikatakan tinggi apabila lebih besar dari *cut of point*-nya, dan dikatakan rendah apabila lebih kecil dari *cut of point*-nya. Sehingga tinggi rendahnya IPM dan PDRB per kapita disini bersifat relatif. Selanjutnya, kabupaten/kota di NTT dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok sebagai berikut:

- 1. PDRB per kapita dan IPM tinggi.** Dalam kategori ini antara PDRB per kapita dan IPM saling menunjang satu sama lainnya. Sumber daya yang diperoleh dari pendapatan digunakan sebagai modal dalam proses pembangunan manusia melalui kebijakan. Sebaliknya, kualitas manusia yang baik sebagai hasil dari proses pembangunan manusia yang berhasil menjadi

modal bagi pembangunan perekonomian. Kabupaten/kota yang termasuk kedalam kelompok ini adalah Kota Kupang, Kabupaten Ngada, Sikka dan Flores Timur.

2. **PDRB per kapita dan IPM rendah.** Pada kategori ini, hubungan antara PDRB per kapita dan IPM saling melemahkan. Relatif rendahnya pendapatan suatu daerah, tentunya dapat menyebabkan rendahnya investasi yang dapat digulirkan. Termasuk investasi untuk pembangunan manusia. Akibatnya antara lain peningkatan status kesehatan, pendidikan maupun daya beli penduduk menjadi relatif sulit untuk dioptimalkan. Sebagai efek balik, kualitas manusia yang relatif rendah menjadi modal yang lemah dalam menggerakkan roda perekonomian. Kabupaten yang termasuk kedalam kelompok ini adalah Timor Tengah Selatan, Manggarai, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo dan Sabu Raijua.
3. **PDRB per kapita tinggi dan IPM rendah.** Dalam kategori ini, PDRB per kapita dan IPM berhubungan secara berkebalikan. Dalam hal ini, pendapatan yang relatif tinggi belum mampu menggerakkan IPM pada level yang tinggi pula. Pemerintah sebagai regulator memiliki peran besar dalam menentukan upaya yang tepat agar hasil dari pembangunan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh penduduk. Sehingga dengan kemampuan ekonomi penduduk yang semakin baik secara merata diharapkan proses pembangunan manusia juga semakin baik. Adapun kabupaten yang termasuk dalam kelompok ini adalah Kabupaten Kupang, Belu, Rote Ndao, Ende, Sumba Barat dan Sumba Timur.
4. **PDRB per kapita rendah dan IPM tinggi.** Dalam hal ini, kualitas pembangunan manusia telah berhasil dicapai walaupun dengan kondisi pendapatan yang relatif kurang. Selanjutnya, upaya menjembatani pembangunan manusia menuju kemajuan perekonomian menjadi penting. Salah satu yang bisa dilakukan adalah investasi pada bidang-bidang produktif yang sesuai dengan komposisi keterampilan penduduk (potensi penduduk). Diharapkan, permintaan terhadap sumber daya manusia dapat ditingkatkan. Hal tersebut sebagai wujud pemberdayaan dari kualitas pembangunan yang sudah relatif baik. Adapun kabupaten yang termasuk dalam kelompok ini adalah Timor Tengah Utara, Lembata dan Alor.

DAFTAR PUSTAKA

http://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Indeks_Pembangunan_Manusia. Diakses pada September 2010.

<http://hdr.undp.org/en/humandev/>. Diakses pada September 2010.

http://p3b.bappenas.go.id/lokna_ruteng/docs/materi/3-MDGS,%20capain%20dan%20kendala%20di%20NTT%20dalam%2077.pdf. Diakses pada September 2010.

www.nttprov.go.id/download/PidatoGubNTT_upacara17.doc. Diakses pada September 2010.

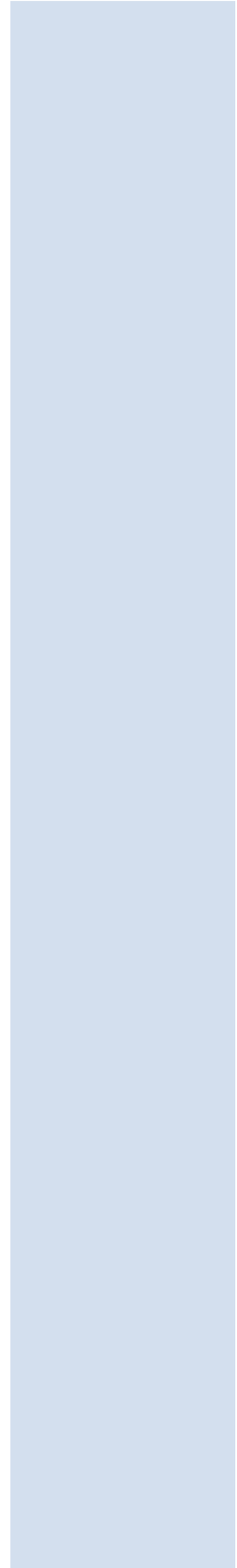
Badan Pusat Statistik. 2007, *Indeks Pembangunan Manusia 2005-2006*. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. 2009, *Indeks Pembangunan Manusia 2007-2008*. Jakarta: BPS.

Ritonga, Razali. 2006. *Indeks Pembangunan Manusia*. Kompas 20 Desember 2006. Opini halaman 4.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

<http://ntt.bps.go.id>



LAMPIRAN TABEL

Tabel 1

IPM dan Komponen IPM Nusa Tenggara Timur 2004-2010

Tahun	Angka Harapan Hidup (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Angka Melek Huruf (persen)	Pengeluaran Riil/Kapita disesuaikan (Rp. 000)	IPM
2005	64,9	6,3	85,60	589,8	63,60
2006	66,5	6,4	86,50	591,2	64,83
2007	66,7	6,4	87,25	594,3	65,36
2008	67,0	6,6	87,66	599,9	66,15
2009	67,3	6,6	87,96	602,6	66,60
2010 ^{*)}	67,5	7,0	88,59	603,8	67,26

Keterangan: ^{*)} Angka sementara

Tabel 2

Reduksi *Shortfall* IPM Nusa Tenggara Timur

Tahun	Reduksi <i>Shortfall</i>
2005-2006	3,38
2006-2007	1,50
2007-2008	2,28
2008-2009	1,32
2009-2010 ^{*)}	1,98

Keterangan: ^{*)} Angka sementara

Tabel 3. Indeks Pembangunan Manusia Nusa Tenggara Timur Menurut Kabupaten/Kota, 2008-2010

Kabupaten	2008	2009	2010 ^{*)}
1. Sumba Barat	62,17	62,90	63,85
2. Sumba Timur	60,80	61,41	61,80
3. Kupang	65,02	65,58	66,00
4. Timor Tengah Selatan	64,83	65,28	65,93
5. Timor Tengah Utara	66,53	66,95	67,49
6. Belu	63,41	63,91	64,34
7. Alor	67,82	68,16	68,48
8. Lembata	66,61	67,15	67,66
9. Flores Timur	67,34	67,77	68,18
10. Sikka	66,69	67,29	67,87
11. Ende	66,14	66,59	67,11
12. Ngada	68,56	69,01	69,45
13. Manggarai	66,21	66,83	67,16
14. Rote Ndao	65,29	65,80	66,18
15. Manggarai Barat	64,44	64,91	65,33
16. Sumba Barat Daya	59,87	60,54	60,99
17. Sumba Tengah	59,01	59,84	60,80
18. Nagekeo	65,73	65,97	66,31
19. Manggarai Timur	64,58	65,02	65,92
20. Sabu Raijua	-	54,53	55,54
21. Kota Kupang	76,58	76,94	77,31
Nusa Tenggara Timur	66,15	66,60	67,26

Keterangan: ^{*)} Angka sementara

Tabel 4. Angka Harapan Hidup Penduduk Nusa Tenggara Timur Menurut Kabupaten/Kota, 2008-2010

Kabupaten	2008	2009	2010 ^{*)}
1. Sumba Barat	64,5	64,8	65,0
2. Sumba Timur	61,6	61,8	61,9
3. Kupang	65,0	65,2	65,4
4. Timor Tengah Selatan	66,6	66,7	66,9
5. Timor Tengah Utara	67,7	68,1	68,3
6. Belu	65,3	65,6	66,0
7. Alor	66,3	66,6	66,9
8. Lembata	66,3	66,5	66,6
9. Flores Timur	67,5	67,8	68,1
10. Sikka	68,4	68,7	69,0
11. Ende	64,4	64,6	64,8
12. Ngada	66,9	67,0	67,2
13. Manggarai	66,9	67,1	67,3
14. Rote Ndao	67,2	67,6	67,9
15. Manggarai Barat	66,0	66,2	66,4
16. Sumba Barat Daya	63,1	63,4	63,6
17. Sumba Tengah	62,4	62,6	62,7
18. Nagekeo	63,3	63,4	63,5
19. Manggarai Timur	67,0	67,3	67,6
20. Sabu Raijua	-	66,9	67,2
21. Kota Kupang	71,9	72,3	72,6
Nusa Tenggara Timur	67,0	67,3	67,5

Keterangan: ^{*)} Angka sementara

Tabel 5. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Nusa Tenggara Timur Menurut Kabupaten/Kota, 2008-2010

Kabupaten	2008	2009	2010 ^{*)}
1. Sumba Barat	5,8	6,0	6,4
2. Sumba Timur	5,9	6,0	6,1
3. Kupang	6,7	6,7	6,8
4. Timor Tengah Selatan	6,1	6,1	6,6
5. Timor Tengah Utara	6,2	6,4	6,8
6. Belu	6,1	6,2	6,3
7. Alor	7,4	7,4	7,4
8. Lembata	6,5	6,5	6,8
9. Flores Timur	6,6	6,6	6,6
10. Sikka	6,1	6,1	6,4
11. Ende	6,8	7,0	7,4
12. Ngada	6,7	7,0	7,3
13. Manggarai	6,7	6,7	6,8
14. Rote Ndao	6,2	6,2	6,4
15. Manggarai Barat	6,2	6,3	6,5
16. Sumba Barat Daya	5,4	5,7	5,9
17. Sumba Tengah	5,2	5,2	5,2
18. Nagekeo	6,7	6,7	7,0
19. Manggarai Timur	5,9	6,2	6,5
20. Sabu Raijua	-	4,5	5,2
21. Kota Kupang	10,9	10,9	11,1
Nusa Tenggara Timur	6,6	6,6	7,0

Keterangan: ^{*)} Angka sementara

Tabel 6. Angka Melek Huruf Penduduk Nusa Tenggara Timur Menurut Kabupaten/Kota, 2008-2010

Kabupaten	2008	2009	2010 ^{*)}
1. Sumba Barat	77,91	78,39	80,40
2. Sumba Timur	82,96	83,01	83,20
3. Kupang	88,72	89,00	89,02
4. Timor Tengah Selatan	84,18	84,37	84,38
5. Timor Tengah Utara	87,45	87,73	87,75
6. Belu	82,79	82,98	83,07
7. Alor	95,94	95,97	95,98
8. Lembata	92,57	92,76	92,77
9. Flores Timur	88,79	89,08	89,35
10. Sikka	90,47	91,27	91,72
11. Ende	93,21	93,50	93,52
12. Ngada	94,49	94,94	95,49
13. Manggarai	90,97	91,07	91,08
14. Rote Ndao	88,55	88,88	89,00
15. Manggarai Barat	88,70	88,75	88,77
16. Sumba Barat Daya	72,01	72,15	72,16
17. Sumba Tengah	71,81	71,91	75,57
18. Nagekeo	93,76	94,01	94,02
19. Manggarai Timur	89,18	89,30	91,09
20. Sabu Raijua	-	74,35	75,29
21. Kota Kupang	98,33	98,47	98,52
Nusa Tenggara Timur	87,66	87,96	88,59

Keterangan: ^{*)} Angka sementara

Tabel 7. Pengeluaran Riil/Kapita/Tahun Penduduk Nusa Tenggara Timur Menurut Kabupaten/Kota, 2008-2010

Kabupaten	(Rp. 000)		
	2008	2009	2010 ^{*)}
1. Sumba Barat	601,5	605,8	606,7
2. Sumba Timur	588,9	594,9	597,0
3. Kupang	595,0	599,9	602,4
4. Timor Tengah Selatan	600,3	604,2	606,7
5. Timor Tengah Utara	603,4	603,8	605,5
6. Belu	595,5	597,1	599,0
7. Alor	595,2	596,8	598,5
8. Lembata	597,3	602,6	605,2
9. Flores Timur	608,3	610,5	612,7
10. Sikka	592,8	595,8	598,0
11. Ende	600,5	601,3	603,3
12. Ngada	610,3	611,7	612,3
13. Manggarai	590,4	596,6	599,2
14. Rote Ndao	588,2	590,6	591,0
15. Manggarai Barat	585,2	588,9	590,6
16. Sumba Barat Daya	602,7	606,0	608,3
17. Sumba Tengah	599,0	608,1	608,9
18. Nagekeo	602,5	603,4	604,7
19. Manggarai Timur	581,1	581,8	583,6
20. Sabu Raijua	-	508,5	509,3
21. Kota Kupang	627,3	628,4	629,5
Nusa Tenggara Timur	599,9	602,6	603,8

Keterangan: ^{*)} Angka sementara

Tabel 8. Reduksi *Shortfall* IPM Nusa Tenggara Timur Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten	2008-2009	2009-2010 ^{*)}
1. Sumba Barat	1,92	2,55
2. Sumba Timur	1,56	1,00
3. Kupang	1,60	1,21
4. Timor Tengah Selatan	1,28	1,85
5. Timor Tengah Utara	1,26	1,63
6. Belu	1,36	1,18
7. Alor	1,04	1,02
8. Lembata	1,62	1,56
9. Flores Timur	1,31	1,27
10. Sikka	1,78	1,79
11. Ende	1,34	1,54
12. Ngada	1,43	1,44
13. Manggarai	1,84	1,02
14. Rote Ndao	1,46	1,10
15. Manggarai Barat	1,31	1,20
16. Sumba Barat Daya	1,65	1,15
17. Sumba Tengah	2,02	2,41
18. Nagekeo	0,68	1,02
19. Manggarai Timur	1,24	2,58
20. Sabu Raijua	-	2,22
21. Kota Kupang	1,54	1,59
Nusa Tenggara Timur	1,32	1,98

Keterangan: ^{*)} Angka sementara

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jl. R. Soeprpto No. 5 Kupang – 85111

Telp.: (0380) 826289, 821755, Fax: (0380) 833124

E-mail: bps5300@bps.go.id